

ABSTRAK

Salah satu upaya *non-penal* yang mana mempunyai potensi efek preventif dalam penanggulangan kejahatan korupsi ialah media massa/Pers. Sehingga apabila Pers dimanfaatkan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sudah sesuai dengan kerangka teoretis dalam kebijakan kriminal. Pentingnya Pers dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi karena media massa atau pers mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam politik kriminal.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. 2) Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum adil. 3) Untuk menganalisis rekonstruksi fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data akan dianalisis melalui 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini, yaitu : 1) Peranan pers atau juga media massa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Nasional akan melaksanakan peranan sebagai berikut: Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; Mengembangkan pendapat umum yang berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan juga saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 2) Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diawasi langsung oleh masyarakat melalui penayangan dan informasi yang di berikan melalui pers/ media masa. Secara tidak langsung dari Undang-undang No 40 Tahun 1999 tersebut pers juga berperan penting dalam penegakan keadilan selama informasi yang di hasilkan dapat memberikan hal positif bagi masyarakat khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. 3) Pelaku tindak pidana korupsi juga memiliki nilai keadilan yang mesti di junjung tinggi oleh para penegak hukum di Indonesia. Maka rekonstruksinya berbunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi : (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, menjaga independensi dan melindungi secara seimbang kepentingan pemerintah dan pelaku korupsi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi : (c). Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar serta melindungi kepentingan umum dan tersangka secara seimbang.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Korupsi, Pers, Nilai Keadilan

ABSTRACT

One of the non-penal efforts which have the potential preventive effect in overcoming corruption crime is mass media / the Press. So that if the Press is utilized in tackling criminal acts of corruption in Indonesia, it is in accordance with the theoretical framework in criminal policy. The importance of the press is used in efforts to tackle criminal acts of corruption because the mass media or the press have a strategic function in criminal politics.

The objectives of this research are: 1) To analyze the implementation of the press function according to Law Number 40 of 1999 towards the enforcement of corruption in Indonesia today. 2) To analyze the implementation of the press function according to Law Number 40 of 1999 regarding efforts to uphold the law of corruption in Indonesia is not fair. 3) To analyze the reconstruction of the press function in Law Number 40 of 1999 concerning efforts to uphold corruption in Indonesia based on the value of justice.

Data analysis method used is descriptive qualitative. Data will be analyzed through 3 (three) activities, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification.

The results of this study, namely: 1) The role of the press or mass media as formulated in Article 6 of the Press Law No. 40 of 1999 concerning Press stated that the National Press will carry out the following roles: To fulfill the right of the public to know; Upholding the basic values of democracy, encouraging the realization of the rule of law and human rights, and respecting diversity; Develop public opinion based on the right, accurate and correct information; Supervise, critique, correct and also advise on matters relating to the public interest; Fight for justice and truth. 2) Actors of corruption in Indonesia can be monitored directly by the public through the presentation and information provided through the press / mass media. Indirectly from Law No. 40 of 1999 the press also plays an important role in upholding justice as long as the information produced can give positive results to the community, especially in terms of law enforcement in Indonesia. 3) Actors of criminal acts of corruption also have a value of justice that must be upheld by law enforcement in Indonesia. So the reconstruction reads Article 3 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press reads: (1) the National Press has the function as a medium of information, education, entertainment, social control, maintaining independence and protecting equally the interests of the government and corruptors. Article 6 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press reads: (c). Develop public opinion based on the right, accurate and correct information and protect the public and suspect interests in a balanced manner.

Keywords: Reconstruction, Corruption, Press, Value of Justice